

MENAKAR HADIS MODERASI BERAGAMA MENUJU KESADARAN INTER-KOMUNIKATIF: PERSPEKTIF JURGEN HABERMAS

Ahmad Ariwijaya

Ilmu Hadis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

E-mail: wari8002@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan masyarakat bermoderasi agama dalam Kemajemukan Indonesia, sebenarnya adalah anugerah Tuhan, tetapi juga menjadi tantangan mendiskusikan anggapan dari masing-masing agama yang notabene susah diatur, seperti halnya kaum-kaum intoleran, sinkretisme, dan ekstremisme. Metode yang digunakan adalah literature review, dengan begitu peneliti bertujuan menjelaskan hadis moderasi beragama dari kacamata Jurgen Habermas Menuju Masyarakat yang komunikatif, temuan yang dapat diambil dari peneliti ini. Pertama, konsep demokrasi deliberatif yang menjunjung tinggi tindakan bermusyawarah dalam membuat keputusan. Kedua, klaim validasi sebagai bentuk proses selanjutnya, dalam mencapai sebuah keberhasilan tindakan komunikasi. Ketiga, merekonstruksi ulang makna komunikasi yang dilakukan Habermas dalam bersosial. Keempat, inter-komunikatif adalah sebuah pencapaian tertinggi seseorang dalam berkomunikasi baik secara jasmani maupun rohani. Maka dengan adanya empat tahapan tersebut akan terjalannya sebuah moderasi yang lebih intersubektif.

Kata kunci

Moderasi Beragama, Tindakan Inter-komunikatif, Jurgen Habermas

ABSTRACT

This research explains that religious moderation in Indonesia's plurality is actually a gift from God, but it is also a challenge to discourse the assumptions of each religion which are in fact difficult to regulate, such as intolerance, syncretism, and extremism. The method used is literature review, so the researcher aims to explain the hadith of religious moderation from Jurgen Habermas' perspective towards a communicative society, the findings that can be taken from this researcher. First, the concept of deliberative democracy that upholds the act of deliberation in making decisions. Second, validation claims as a form of further process, in achieving a successful communication action. Third, reconstructing the meaning of communication by Habermas in socializing. Fourth, inter-communicative is a person's highest achievement in communicating both physically and spiritually. So with these four stages there will be a more intersubjective moderation.

Keywords

Religious Moderation, Inter-communicative Action, Jurgen Habermas

1. PENDAHULUAN

Praktik masyarakat dalam memulai pembicaraan adalah fenomena bahwa manusia mempunyai sebuah tindakan berpikir yang sosial, (Pradopo, 2012) gagasan penting dalam sebuah percakapan bagaimana terjalannya sebuah hubungan yang akurat, bentuk tersebut dapat kita temukan dalam sebuah kegiatan yang berkehendak dengan sendirinya. Salah satunya bentuk moderasi beragama yang harus dibenarkan nilai-

nilainya. Sebagaimana indikator moderasi tentang komitmen berbangsa. Sebagai konteks sosial sangat penting digambarkan sampai mana seseorang melihat sudut pandang, praktik, dan reaksi kesetiaan pada bangsanya, ikut terikatnya toleransi antar-agama. (Kementrian Agama, 2019a, p. 43)

Penyebaran semua agama di Indonesia menjadi sebuah *timeline* historis khusus, karena ada macam variasi agama, budaya, dan sifat tumbuh pada diri masyarakat islam yang majemuk. Sehingga perlu adanya sebuah lembaga-lembaga yang mengkoordinir lintas iman untuk membantu dialog antar-agama, dengan harapan menumbuhkan jiwa saling toleransi terhadap agama-agama yang sudah berjalan. (Effendi, 2018, p. 13) Maka, layak Indonesia diimplementasikan dengan negara sebagai bhinneka tunggal ika.

Walaupun pada prosesnya, para *public figure* sudah bekerja keras dalam perkembangan karya ilmiah tentang kerukunan umat beragama, namun Indonesia belum bergerak sepenuhnya untuk menindaki lebih lanjut terhadap kaum-kaum Ekstremisme. *Mostly* tolok ukur dalam mencegah golongan ekstrem yaitu dengan cara moderasi, secara bahasa di kamus Indonesia dijelaskan sebagai pengurangan dampak kekerasan dan penghindaran ekstremisme.

Moderasi dalam konteks Arab diartikan sebagai *wasath* yang mempunyai varian makna. Contohnya dapat dilirik dari beberapa aspek keilmuan, diibaratkan orang yang melakukan *washathiyah* dapat diartikan perlunya sebuah sinergi tarik-menarik antara yang di tengah dan kedua ujungnya, yang memungkinkan orang harus dijalur yang seimbang, tetapi tidak cukup hanya bermodalkan imbang, haruslah dimengerti untuk menghadapinya, dibutuhkan pemahaman, dan pembelajaran yang cukup, supaya penarikan di antara ujungnya tali tidak sampai berlebihan, sehingga dapat menjaga upaya yang selama ini dinamakan kebaikan yang merupakan jalan hakikat *washathiyah*. (Shihab, 2019, p. 3)

Pemikiran orang yang bermoderasi terlihat bagaimana menjalin hubungannya dengan sesama makhluk, di sisi lain dengan menjalin keakraban antar-umat beragama akan mempererat benih *trust* masing-masing individu, lalu dibutuhkanlah sebuah mediasi untuk bermusyawarah dalam ruang lingkup interreligius. Dengan adanya tindakan ini akan memperkuat individual masyarakat yaitu akal pikiran, dan emosionalnya. (Nole & Serdianus, 2023) sifat ini tentunya menjadikan masyarakat Indonesia yang berkarakter pluralisme sejak dini.

Secara umum, penelitian ini membahas Hadis terkait moderasi beragama dengan mengacu pada konsep yang diterapkan oleh Habermas, tentang teori tindakan komunikatif, mengedepankan interaksi sosial yang menjadi contoh dua ataupun beberapa subjek yang saling berdialog. Untuk memahami lebih dalam, apa yang dimaksud? dan tujuan perkembangan moderasi masyarakat Indonesia, menjadikan tindakan komunikasi yang digagas oleh Jurgen Habermas menjadi salah satu bentuk batu loncatan tentang kesepakatan bersama, dalam model moderasi beragama saat ini. (Habermas, 1984a, p. 86)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kategori kualitatif yang bersifat kepustakaan (*literature review*) dalam prosesnya untuk memperluas teori ketika sebuah teori masih belum seutuhnya atau masih bisa dapat dikritik, sebagaimana teori yang ada tidak bisa menyingkapkan kompleksitas dari permasalahan yang terjadi. (John W. Creswell, 2015, p. 18) John Creswell mendefinisikan bahwa dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti membutuhkan elemen-elemen terkait permasalahan yang akan diangkat, selaras dengan memperbanyak data karya ilmiah berupa artikel, buku dan pengumpulan data. (Conny R. Semiawan, 2010, pp. 18–19) Penelusuran informasi data-data dapat dilakukan dengan sumber primer melalui kitab-kitab hadis *kutub as-sittah*, atau kitab klasik lainnya. Untuk melengkapi penelitian, maka ada langkah selanjutnya sebagai proses penyempurnaan yaitu, sumber sekunder sebagai pemantik untuk melengkapi data mutakhir, tentu kaitannya dengan moderasi beragama, dan kaum ekstremisme.

Acuan dalam menanggapi penelitian yang terkait hadis moderasi beragama dalam mencegah ekstremisme, peneliti menganalisis dengan teori pemahaman *Ulumul Hadits*, salah satu cabangnya adalah *Ilmu Mushthalah al-Hadits* yang membahas pengertian ilmu-ilmu hadis, dapat dijumpai diberbagai media di kalangan ulama hadis. Umpamanya, *sanad, matan, mukharrij, mutawatir, ahad, shahih, hasan, dha'if*, dan lain-lain. Tujuannya mempermudah para peneliti menelusuri jalur-jalur keautentikan hadis dari berabagai perspektif ilmu yang telah dibukukan. (Khon, 2012, p. 102) Tindakan berikutnya, akan dibungkus dengan pemahaman Jurgen Habermas, yang sering disajikan dalam metode hermeneutik.

3. TINJAUAN PUSTAKA

Masyarakat yang komunikatif akan berdampak pada generasi-generasi selanjutnya terutama pada masyarakat awam. Peneliti membangun gagasan bahwa tindakan moderasi seringkali diartikan ke rana yang bermacam-macam, seperti yang dilakukan oleh Ridwan menjelaskan metode hermeneutik Fazlur Rahman dalam menerapkan konsep moderasi beragama dengan konteks keindonesian. (Ahmad Hasan Ridwan et al., 2022, p. 60) sebagai bentuk keragaman bermacam-macam. Hal tersebut muncul sebuah indikator-indikator moderasi beragama, 1) komitmen secara nasional, 2) toleransi, 3) anti-kekerasan, 4) akomodasi budaya lokal.

Berikutnya, pembahasannya menyangkut kepercayaan yang ada di Aceh, karena daerah tersebut diterapkan sebuah konsep syariat Islam. (Indainanto et al., 2023, p. 10) melihat kebearagaman yang ada, pastinya ada kepercayaan lain yang dianut di Aceh, maka komunikasi yang terjadi di Aceh sering membawa pada kericuhan seperti persoalan rumah ibadah. Maka timbul sebuah strategi komunikasi Islam melalui dialog, dan memunculkan nilai-nilai apresiasi lewat komunikasi antar umat beragama. Untuk menengahi aspek-aspek keberagaman peran Forum Kerukunan Umat Beragama atau disebut FKUB, keuntungannya sangat signifikan dengan adanya peran organisasi ini dalam perkembangan dialog antar-agama

Sering kali pula, Pembelajaran dilingkungan pendidikan sangat perlu merangkul moderasi beragama, sejak usia anak-anak mulai beranjak dewasa untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas.(Naj'ma & Bakri, 2023, p. 430) Sebagaimana dalam buku tersebut adakah nilai-nilai moderasi beragama sejak dini, dengan melihat buku bacaan anak-anak sekolah, maka bisa direalisasikan dalam tindakan sosial masyarakat bahwa anak tersebut tercegah dari kelompok-kelompok ekstremisme.(Mulyana, 2023, p. 3) Berlaku juga di lembaga pendidikan di lingkungan Pesantren. Walaupun ada yang menjamin bahwa lingkungan pesantren membawa nilai-nilai yang islami, juga belum tentu terlaksana dengan baik, terkadang dapat dicampuradukan oleh kaum ekstremisme dari luar yang mengatasnamakan pihak yang sudah dipercaya padahal hanya sebuah kedok belaka, sehingga upaya P/CVE perlu terus dilakukan untuk memperkenalkan program CISForm, sebagai bentuk *centering* di Kampus UIN Sunan Kalijaga, yang terus mengevaluasi program keberagaman moderasi yang dikembangkan oleh CISForm sebagai tujuan mengelolah pemikiran yang bersifat inklusif terhadap praktik moderasi, apalagi di lingkungan pesantren sebagai aktor utama dan muslim konservatif.(Wildan & Muttaqin, 2022, p. 40)

Moderasi beragama sebenarnya simpel jika seorang memang benar-benar sungguh menyatakan dengan niat.(Latifa et al., 2022, p. 10) Niat Moderasi Beragama biasanya dibentuk oleh pengetahuan dan sikap. Kedua, mengkonstruksi, instrumen pengetahuan moderasi beragama Islam dan sikap moderasi beragama Islam. Ketiga, menguatkan niat yang moderat pada umat muslim dan agama lain, tentunya dengan praktik yang berlanjut.(Latifa et al., 2022, p. 13) Pada tahanan yang berkembang akan menemukan tiga macam unsur moderat (1) Perlu menekankan moderasi tentang agama Islam, (2) Perlu menekankan sikap bermoderasi yang islami, dan (3) Melihat kembali makna niat untuk bermoderasi. Selaku peneliti dapat disimpulkan bahwa, dalam mengkaji sebuah tatanan moderasi beragama, peneliti menggunakan metode hermeneutik Jurgen Habermas, yang mengacu pada sebuah tindakan masyarakat yang komunikatif.(Hardiman, 2009c, p. 47) Dan pada teorinya peneliti memperjelas bagaimana tindakan atau kesadaran masyarakat awam di lingkungan yang inklusif, dan mempertajam hak-hak asasi individu pada kelompok terkucikan untuk mendapatkan peluang yang emansipasi,(Hardiman, 2015, p. 230) tentu sebagai proses yang berkelanjutan menuju masyarakat yang komunikatif secara moderasi sebagai landasan utama yaitu merepresentasikan tindakan Nabi Muhammad dan Pancasila.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena menarik jika melihat pemikiran Habermas, dari mana dia mencakup sebuah konsep keilmuan ke dalam sebuah karya yang mencuat hingga saat ini. Dari ceritanya ada dua alasan teori yang saat ini kita gunakan, dijelaskan pada tulisannya di kala usia tuanya. Pertama, karena pengalaman dia mengoperasi bibir sumbingnya yang menjadikan traumatis hingga kesadaran berpikir manusia mempunyai sebuah koneksi yang lemah, dalam hal keterbatasan hingga membutuhkan sebuah ikatan saling ketergantungan. Kedua, masa sekolah, sering diijek oleh teman-teman sebayanya karena pengucapannya tidak seperti orang normal akibat bibir sumbingnya, yang mungkin

Habermas untuk tidak banyak berbicara secara *face to face*, maka dia memutuskan tulisan adalah sebuah keunggulan dalam menyampaikan pendapatnya.(Hardiman, 2015, p. 204) Untuk memahami dengan sederhana peneliti mempertimbangkan langka kongkrit, sebagai proses pemahaman moderasi

A. Demokrasi Deliberatif

Penggunaan deliberatif muncul pada aba ke-18, di mana masyarakat borjuis melakukan sebuah kegiatan secara bersama-sama untuk berdiskusi permasalahan di rana publik, tujuannya adalah menggiring opini masyarakat secara luas, agar dapat di dengar oleh otoritas negara,(Habermas, 1989, p. 108) gagasan borjuis di ruang publik menjadi sebuah harapan keputusan teguh bagaimana kalangan bawah menghadapi ketidakadilan sosial yang tidak realis, hingga keputusan politik dapat didasarkan oleh keadilan, bukan wewenang otoritas.(Habermas, 1989, p. 123) Penyaluran pendapat dapat juga dijumpai pada surat kabar, majalah, dan sarana tempat nongkrong menjadi pintu untuk berdiskusi dalam menyampaikan pendapat dan kritik.(Habermas, 1989, p. 160)

Merujuk pada konsep *washsthiyah* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, konsep deliberatif dikemas sebagai bentuk instrumen dari para pemikir yang menuntut keadilan, toleransi, dan moderasi. Model pemahaman diperlukannya sebuah pencapaian masyarakat yang sukses, tentu dapat dinilai dari kerukunan umat beragama ataupun keadilan sosial, dijelaskan bahwa moderasi yang menjadi kunci patokan, seperti orang yang berada di tengah-tengah sebuah kelompok yang tidak memihak siapapun.(Kementrian Agama, 2019b, p. 2) Untuk meraih moderasi dilihat dari kacamata hadis, bahwa kegiatan yang membawa kedamaian antar-agama dan sosial masyarakat adalah kuncinya. Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُسَدَّدُ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي قَابُوسَ، مَوْلَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «الرَّاجِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّنْ فِي السَّمَاءِ» لَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Terjemahan:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Musaddad secara makna, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru dari Abu Qabus -mantan budak (yang telah dimerdekakan oleh) Abdullah bin Amru- dari Abdullah bin Amru dan sanadnya sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, (beliau bersabda): "Para penyayang akan disayangi oleh Ar Rahman. Sayangilah penduduk bumi maka kalian akan disayangi oleh siapa saja yang berada di langit." (HR. Abu Daud)

Menurut Habermas dalam menangani sebuah konflik terhadap masyarakat yang tidak bisa diajak kompromi, maka teori diskursus dalam demokrasi tepat, agar suara masyarakat dapat terdengar oleh pemerintah setempat. Demokrasi yang di gagas Habermas adanya sebuah *role* dalam mengisi kebijakan-kebijakan yang akan di

tetapkan.(Muthhar, 2020) maka hal ini dapat menimbulkan dialog antara masyarakat dan pemegang otoritas, dalam menekankan bahwa demokrasi asli (demokrasi moral Rousseau) tidak cukup dan bahwa model demokrasi yang lebih baik adalah yang melibatkan interaksi dan diskursus antara masyarakat.(Habermas, 1989, p. 117)

Maka perlu peneliti tinjau bagaimana sejarah Nabi ketika menetapkan Piagam Madinah, sebagai bentuk bukan hanya pluralism agama di masa itu. Tetapi simbol kesatuan. Ada beberapa pasal yang terkait persoalan antar agama dan bagaimana *action* dalam memahami antar-agama, sebagai berikut:

Pertama, Hak kewajiban manusia tercantum dari berbagai aspek yang ditentukan hingga menjadi IX Pasal, dari sini mencetuskan hak-hak yang berhak didapatkan dari masing-masing kaum (*bani*), dipihak pertama ada kaum Muhajirin dari Quraisy yang tetap memiliki hak origin warga yaitu bersifat sebagai warga negara resmi, sebagai bentuk warga negara maka, tidak terkecuali semua kaum Quraisy, Auf (dari Yastrib), Sa'idah, Al-Harts, Jusyam, Najjar, amr bin Auf, An-Nabit, dan Al-Aus hendaknya membayar sebuah *diyath* (tebusan), apabila ada kesalahan, dan menerima diyath sebagai orang yang terdampak kesalahan. (Ahmad, 2014, pp. 12–14)

Kedua, Persatuan Segenap Warga Negara terdiri dari VIII Pasal yang menjelaskan bahwa, setiap warga negara baik dari Kaum Yahudi yang setia kepada negara, maka akan mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi hak-haknya dan sebaliknya, tidak boleh saling menyudutkan. Apabila ada sebuah kegaduhan terjadi misalnya sebuah peperangan atau penyerangan dari pihak lain, maka wajib untuk semua orang hendaknya Bersiap Bersatu antar semua golongan. Jika seorang membunuh dan ada bukti valid maka siap dikenakan sanksi. Dan dilarang mengkhianati sesama warga negara. (Ahmad, 2014, pp. 16–19)

Ketiga, Tugas Warga Negara terdiri dari III pasal, warga negara hendaknya memerlukan izin dari Nabi Muhammad jika ada keperluan ke luar negara, kaum Yahudi memikul biaya negara begitu pun kaum Muslim, semua warga hendaknya saling menasehati, berbuat kebajikan, dan menjauhi segala dosa, pertolongan dan bantuan hendaknya diberikan kepada golongan yang teraniaya. (Ahmad, 2014, p. 21)

Keempat, Melindungi Negara terdiri dari III pasal, menjelaskan kota Yastrib, Ibu Kota Negara tidak boleh dilanggar oleh setiap peserta Piagam Madinah, segala tetangga harus diperlakukan seperti diri sendiri, tidak boleh diganggu ketentramannya, dan tidak boleh diperlakukan salah, setiap kehormatan seorang wanita dijaga, apabila ada kunjungan harus ada izin dari suami ataupun orang yang sedarah.(Ahmad, 2014, p. 22)

Kelima, Pimpinan Negara terdiri dari III pasal, setiap persitiwa penting hendaknya harus segera dilaporkan dan ditetapkan kepada hukum Allah dan Utusannya Nabi Muhammas. Seorang musuh dari kaum Quraisy sekalipun tidak boleh dilindungi, begitupun orang yang membantu, setiap warga sudah terikat janji pertahanan bersama dan menentang setiap *aggressor*. (Ahmad, 2014, pp. 22–23)

Keenam, Terdapat politik untuk saling berdamai terdiri dari II pasal, mengedepankan keharmonisan setiap kali ada ajakan untuk berdamai maka kaum

beriman harus melaksanakannya, kecuali terdapat kaum-kaum yang membangkang, kewajiban setiap warga negara kepada perdamaian, tidak terkecuali kaum Yahudi dari Aus, karena perdamaian menghilangkan segala kesalahan.(Ahmad, 2014, pp. 23–24)

Melihat beberapa pasal tentang Piagam Madinah, bahwa dalam menjalankan sebuah sistem kewarganegaraan, hendaknya ada sebuah timjaun khusus yaitu ketetapan dari beberapa pihak dan harus menyetujui hal tersebut, salah satunya melalui musyawarah, sebagaimana kesepakatan yang dianggap habermas adalah hubungan manusia, termasuk nalar berpikir sebagai kaum intelektual, praktik kritik ini akan menjelaskan sebuah alur pikir kepada masyarakat tentunya, melalui interaksi akan terhadap diri maka akan muncul sebuah mawas diri yaitu sikap mengoreksi diri sendiri. Sebagai keadaan yang bersifat pluralisasi yang membuat individu seorang akan terus berkomunikasi kepada refleksi diri setelah itu bertanya tentang komunikasi kepada dirinya. Maka musyawarah secara tidak langsung akan memicu tindakan yang merefleksikan dirinya, kepada orang lain itulah yang disebut angan-angan.(Pusey, 2011, p. 164)

Maka proses memahami musyawarah tidak bisa dapat hanya *verstehen* (memahami) tapi adanya *erklaren* (intropeksi diri).(Hardiman, 2015, p. 229) Maka solusinya demokrasi deliberatif bergandengan tangan dengan konsep moderasi yang menjunjung tinggi sikap kesetaraan, kejujuran, kebersamaan, keseimbangan terhadap pihak masyarakat dan pemerintah. Agar dapat membebaskan diri dari hal dogmatisme atau kesadaran palsu, bukan hanya menghilangkan kesadaran palsu, tetapi juga dapat merekonstruksi pemahaman baru terhadap cara pandang dan pengetahuan diri.(Hardiman, 2009b, p. 187) Karena moderasi memerlukan sebuah jalan dalam menggapai tujuan baru, salah satunya adalah musyawarah demokrasi deliberatif, dengan melihat unsur-unsur Hadis perdamaian dan sejarah Nabi membangun keyakinan kepada penganut kepercayaan lain.

B. *Validity claims*

1. Klaim Kebenaran (*truth*)

Perjalanan menuju kebenaran adalah dengan membawa pemahaman dunia alamiah dan objektif. Kegiatan empiris akan membawa kita melalui dimensi bawah sadar secara subektif yang membutuhkan kebenaran secara proposisi, Artinya seseorang hendaknya mempelajari bagaimana hidup yang dilakukan orang lain.(Hardiman, 2009c, p. 18)

2. Klaim Ketepatan (*rightness*)

Kesepakatan dalam melaksanakan kegiatan norma-norma dunia soasial yang ada, untuk menjelaskannya bahwa tindakan sepakat untuk menjamin seseorang bermoderasi hendaknya melakukan norma-norma sosial.(Hardiman, 2009a, p. 36) Maka tradisi yang ada perlu diterapkan untuk menjalankan tindakan komunikatif berlangsung. Dalam bermoderasi sendiri Kementerian Agama menetapkan indicator moderasi beragama,1) Komitmen Kebangsaan, 2) toleransi 3) anti-kekerasan, dan 4) akomodatif terhadap budaya lokal.(Kementrian Agama, 2019a, p. 43)

3. Klaim Kejujuran (*sincerity*)

Selanjutnya kesepakatan dalam memahami ekspresi antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang, Kesepakatan ini, menjadikan validitasnya setuju akan sebuah konsep di mana seseorang sudah mulai konsistensi menggapai perilaku yang lebih baik.

4. Klaim Komprehensibilitas (*comprehensibility*)

Corak klaim ini membawa kita pada proses sebelumnya yang mana sudah mendorong ke tiga klaim sampai saat ini, ketika sudah memenuhi klaim sebelumnya orang akan dapat berhasil pada puncak berkomunikasi dengan baik. (Hardiman, 2009c, p. 18) Maka hal tersebut bersifat melalui interaksi yang berlangsung digunakan untuk mencerna kesalahpahaman yang ada hingga membangun kepercayaan masing-masing. (McCharty, 2006, p. 374)

C. Proses Aplikasi Komunikatif

Evolusi sosial sudah sangat maju bahkan dalam perkembangan yang semakin maju, teknologi semakin berkembang pesat. Landasan dalam berdiskusi kian memaksa manusia harus mempunyai sebuah teknologi tiap individu, terutama cara berkomunikasi dalam hal yang harus dilakukan sekarang, bagaimana surat menjadi *whatsapp* bagaimana televisi menjadi youtube dan Tiktok, itu semua karena evolusi teknologi, tetapi Habermas dalam sebuah mengenai *complain*-Nya terhadap perkembangan teknologi dalam komunikasi bermasyarakat agak berbeda dengan Marx yang mengatakan faktor penghasil revolusi adalah teknologi, karena Habermas hanya berfokus pada hubungan-hubungan kemasyarakatan dalam dua dimensi, yaitu kerja dan komunikasi. (Hardiman, 2009c, pp. 112–113)

Validitas Habermas mungkin belum terlaksana dalam memprediksi teknologi di masa sekarang, yang dapat menjelajahi layaknya ruang nyata. Secara logika yang menekankan tindakan komunikasi secara relevan tidak melihat secara temporal, ketidakmatangannya justru menjadi senjata yang ampuh dalam prinsip komunikasi, yang dicontohkan oleh organisasi-organisasi yang bermusyawarah dengan melacak keberadaan institusinya. (Hardiman, 2009b, p. 133) Tetapi peneliti berpendapat bahwa, cara komunikasi lama memang efektif, tetapi teknologi sekarang harus mulai diikuti sertakan dalam berkomunikasi, apalagi kaum Gen Z dan Alpha menjadi sebuah jembatan penerus bangsa, bagaimana tindakan mereka dapat dilihat di kampanye baik di media maupun luring, para generasi yang melek media dapat mengawali pembaharuan dalam kunci komunikasi sosial, Natalie Stroud mengatakan media mempunyai aspek penting untuk mencuri perhatian, apalagi seseorang yang mempunyai *stage name*, tentunya ada pendengar setia dalam mengikuti karirnya. (Pratiwi et al., 2021, p. 87)

D. Moderasi Inter-Komunikatif (Emansipasi/Kesapahaman)

Merujuk pada kritik-kritiknya Habermas terhadap Hans-Georg Gadamer, peneliti menemukan seni memahami teori Habermas lebih khusus, mengenai persoalannya

terkait masyarakat modern yang demokratis dan juga pluralis. Karena secara tidak langsung Habermas pun belajar banyak dari tokoh Gadamer dan Dilthey, dalam prosesnya berhubungan dan komunikasi sosial yang kognitif dengan capaiannya adalah bentuk intersubjektif, maka interpretasinya mengacu pada opus *truth and Method*, dikenal dengan *horizon to horizon*.(Hardiman, 2015, p. 232) Maka Habermas memadukan pemahaman Gadamer dengan subjek to subjek yang membutuhkan kesepahaman terbuka.(Habermas, 1984b, p. 104) Diiringi dengan tindakan sosial untuk memvalidasi sebuah kritik yang tertera yaitu klaim-klaim sebelumnya.(Habermas, 1984b, p. 96)

Sebagai bangsa Indonesia para pelopor sebelumnya menilik dengan merumuskan simbol negara yang cocok untuk bangsa, maka digagaslah sebuah ideologi Pancasila, yang dapat mempererat hubungan moderasi beragama dengan melakukan kegiatan sosial, menjaga nilai budaya, tradisi, saling menghargai keberagaman, dan gotong royong hingga menimbulkan komitmen untuk menjaga Indonesia secara turun menurun.(Kementerian Agama, 2019, p. 24) Untuk menggapai inter-komunikatif Habermas menerapkan tiga konsep kepentingan kognitif.

Pertama, kepentingan teknis yang berasal dari pengalaman subjek manusia dan pencapaian dalam melakukan analisis struktural kehidupannya yang menghasilkan ilmu pengetahuan dari individu. Hal ini bertujuan mengendalikan keadaan yang muncul dari luar, agar lebih tertata.(Badillo, 1991, p. 40) Kedua, Kepentingan Praktis yang berfokus pada dimensi intersubjektif seperti sejarah, sosiologi untuk menjaga interaksi dari dua individu atau pun lebih.(Badillo, 1991, p. 31) Ketiga, kepentingan emansipatoris yang terpengaruh dari *lahiriyah* manusia untuk membebaskan keadaan masyarakat dari hambatan internal maupun eksternal.(Badillo, 1991, p. 35) Pada tahap emansipasi haruslah bergandengan dengan kepentingan teknis dan praktis.(Badillo, 1991, p. 39)

Melalui tiga kepentingan tersebut, moderasi beragama adalah contoh representatif mengemban amanah untuk saling peduli antar agama, sebagaimana Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal nomer 2107 yang artinya, manakah agama-agama yang dicintai oleh Allah Swt, Rasulullah berkata *al hanafiyah as samhah* yang lurus lagi toleran.(Ahmad bin Hanbal, Dar al Hadis, 1995,p.522) Urgensinya manusia haruslah memperhatikan hak sesama saling berbagi, sebagai sarana untuk membebaskan kehendak yang tercipta sembarangan, dan keputusan yang diambil masyarakat, otoritas, maupun pihak yang terkait agar selalu transparansi secara publik.(Badillo, 1991, p. 37)

Maka Inter-komunikatif tahapan yang dibentuk melalui dasar tindakan subjektif hingga sampai pada tahapan emansipasi, yang pada ujungnya dapat membentuk karakter moderasi agama secara terstruktur. Makanya etika komunikatif berperan penting sebagai pelaksana menuju masyarakat, yang berkomunikasi tanpa adanya sebuah penghalang. Sebagai tujuan awal komunikatif dapat membeaskan kita dari sebuah belenggu dogmatis. Terutama bagi partisipasi yang baru memulai tindakan

komunikatif subjek to subejk, proses tersebut sepenuhnya disertai kesadaran dalam bertindak.(Hardiman, 2009c, p. 196)

5. KESIMPULAN

Jurgen Habermas seorang yang berjasa menempatkan demokrasi deliberatif sebagai bentuk tindakan bersama. Hal tersebut dapat dikontrol melalui validasi klaim-klaim kebenaran, ketepatan, kejujuran, dan komprehensibilitas, soal bagaimana teori tindakan komunikatif dapat berjalan beriringan dengan moderasi beragama sebagai konsep Al-Qur'an dan Hadis, yang mempunyai sebuah tujuan akhir untuk membebaskan (emansipasi) dan menyuarakan pendapat dengan rasionalis, secara praktik mendasari terjalannya inter-komunikatif di masyarakat yang majemuk, hingga dapat mengesampingkan kehendak personal serta mengurangi penyebab ketimpangan di ruang publik, tentu salah satu faktornya termasuk bermoderasi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan Ridwan, Mohammad Taufiq Rahman, Yusuf Budiana, Irfan Safrudin, & Muhammad Andi Septiadi. (2022). Implementing and Interpreting Fazlur Rahman's Islamic Moderation Concept in the Indonesian Context. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 12(2), 58–73. <https://doi.org/10.32350/jitc.122.05>
- Ahmad, Z. A. (2014). *Piagam Madinah: Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*. Pustaka Al-Kautsar.
- Badillo, R. P. (1991). *The Emancipative Theory of Jürgen Habermas and Metaphysics* (Vol. 13). The Council for Research in Values and Philosophy.
- Conny R. Semiawan. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Effendi, D. (2018). *Pluralisme dan Kebebasan Beragama*. Institut DIAN/Interfidei.
- Habermas, J. (1984a). *The Theory Communicative Action Vol. 1 Reason and Rationalization of Society* (T. McCharty, Trans.). Beacon Press.
- Habermas, J. (1984b). *The Theory of Communicative Action Volume I Reason and The Rationalization of Society* (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press Boston.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. The MIT Press.
- Hanbal, A. bin. (1995). *Musnad Ahmad* (1st ed., Vol. 2). Dar al Hadis.
- Hardiman, F. B. (2009a). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Kanisius.
- Hardiman, F. B. (2009b). *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*. Kanisius.
- Hardiman, F. B. (2009c). *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. Kanisius.
- Hardiman, F. B. (2015). *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*. Kanisius.
- Indainanto, Y. I., Dalimunthe, M. A., Sazali, H., Rubino, & Kholil, S. (2023). Islamic Communication in Voicing Religious Moderation as an Effort to Prevent Conflicts of Differences in Beliefs. *Pharos Journal of Theology*, 104(4), 1–13. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.104.415>

- John W. Creswell. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan* (Saifuddin Zuhri Qudsy, Ed.; Ahmad Lintang Lazuardi, Trans.; Edisi Ke-3 Terjemahan dari Bahasa Inggris). Pustaka Pelajar.
- Kementerian Agama. (2019). *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementrian Agama. (2019a). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementrian Agama. (2019b). *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (1st ed.). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Khon, A. M. (2012). *Ulumul Hadis* (Edisi Kedua). Amzah.
- Latifa, R., Fahri, M., Subchi, I., & Mahida, N. F. (2022). The Intention of Becoming Religiously Moderate in Indonesian Muslims: Do Knowledge and Attitude Interfere? *Religions*, 13(6), 1–17. <https://doi.org/10.3390/rel13060540>
- McCharty, T. (2006). *Teori Kritis Jurgen Habermas* (Nurhadi, Trans.). Kreasi wacana.
- Mulyana, R. (2023). Religious moderation in Islamic religious education textbook and implementation in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1), 1–8. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8592>
- Muthhar, M. A. (2020). Membaca Demokrasi Delibratif Jurgen Habermas dalam Dinamika Politik Indonesia. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v2i2.15180>
- Naj'ma, D. B. A., & Bakri, S. (2023). PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA DALAM PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(2), 421–434. <https://doi.org/10.22515/academica.v5i2.4919>
- Nole, O. A., & Serdianus, S. (2023). Pendidikan Interreligius Berbasis Moderasi Beragama Untuk Membentuk Karakter Bangsa. *MELO: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(2), 90–106.
- Pradopo, R. D. (2012). Semiotika: Teori, Metode, dan Penerapannya. *Humaniora*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.22146/jh.607>
- Pratiwi, P. S., Seytawati, M. P., Hidayatullah, A. F., Ismail, I., & Tafsir, T. (2021). Moderasi Beragama dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & Tik-Tok). *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29240/jdk.v6i1.2959>
- Pusey, M. (2011). *Habermas: Dasar dan Konteks Pemikirannya*. Resist Book.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati.
- Sulaiman bin al-As'ath, A. D. (n.d.). *Sunan Abu Daud: Vol. Juz 4*. Maktabah Asriyah.
- Wildan, M., & Muttaqin, A. (2022). Mainstreaming Moderation in Preventing/Countering Violent Extremism (P/CVE) in Pesantrens in Central Java. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 10(1), 37–73. <https://doi.org/10.21043/qijis.v10i1.8102>